

# Sisi Terang dan Warisan Daendels

Bagian Terakhir  
dari Dua Tulisan

Oleh : Heri Priyatmoko

DEMI meraup dana segar dalam tempo singkat, Daendels menghidupkan kembali kebiasaan VOC, yaitu menjual tanah partikelir (*particuliere landrijen*) dan memberikan kepada pembelinya hak pertuanan (*heerlijke rechten*). Pembayarannya boleh dicitil dan pendapatan dari pemanfaatan tanah dipakai sebagai agunan.

Seperti yang diuraikan Putri Agus Wijayati (2001), penjualan tanah-tanah digelar dari pedalaman Batavia sejak Agustus 1808, mulai dari Tangerang, Banten, Jasinga, terus merambah hingga Semarang dan Surabaya. Setelah mengunjungi Ujung Timur Jawa, Daendels menyorongkan pendapat ke Dewan Hindia untuk menjual tanah-tanah di Besuki, Panarukan, dan Probolinggo.

Orang Cina yang kali pertama membayar tanah yang ditawarkan Daendels adalah dua

Han bersaudara, di mana sejak era Daendels telah membeli tanah negara atau tanah pemerintah yang dijadikan tanah perkebunan. Han Tjan Pit membeli tanah di Besuki dan Panarukan, sementara sang adik, Han Kit Ko meniru langkah saudaranya membeli Probolinggo. Penjualan tanah disertai pemberian sejumlah hak istimewa berupa kehidupan penduduk pribumi di Probolinggo.

Bukan cuma jual beli tanah, Daendels juga melakukan praktik jual beli jabatan untuk posisi petugas pajak hingga bupati. Posisi seperti bekel dan demang diperdagangkan, lalu tradisi ini disebut *venality of office* atau jabatan korup. Sementara itu, Han Kit Ko muncul sebagai orang pertama yang membeli jabatan bupati di Probolinggo akhir tahun 1810.

Jual beli jabatan sebenarnya sudah kerap dilakoni oleh kerajaan tradisional guna menutupi kebutuhan keuangan yang mendesak dari pusat atau raja. Penjualan jabatan dan hak

penarikan pajak ditempuh lantaran butuh dana mendesak serta belum tersedianya petugas personalia yang memadai untuk menjalankan tugas pemungutan pajak bagi negara.

Selain itu, ia berani mereformasi administrasi kolonial kompeni Belanda dan birokrasi feodal kerajaan yang dinilai tidak efektif dan subur penyimpangan. Tidak berlebihan jika periode Daendels dikatakan sebagai periode runtuhnya tatanan Jawa; merombak sistem negara tradisional yang telah berlangsung dan mapan selama berabad-abad. Segala sesuatu yang dilakukan Daendels selama pemerintahannya (1808-1811), pada kenyataannya cenderung ditujukan untuk kepentingan penguasa pusat di Eropa, ketimbang masyarakat pribumi. Prioritas Daendels ialah melaksanakan instruksi Louis Bonaparte, tak memedulikan metode yang ditempuh dan berapa pun biaya yang harus dikeluarkan. Tak ayal, sentralisme kekuasaan

Daendels berikut peraturan yang diterapkan melahirkan konflik dengan para penguasa lokal dan masyarakat setempat.

Pelaksanaan sentralisasi kekuasaan tetap memberi manfaat positif, yaitu dengan adanya sentralisme di segala lini, jenis-jenis pelanggaran seperti korupsi, kolusi, penyimpangan, penyelewengan, penyuapan menurun drastis. Dan yang paling pokok adalah Daendels berhasil meletakkan konsep negara modern di Hindia Belanda. Termasuk tata kelola administrasi yang lebih sistematis dan terstruktur dalam pengaturan keuangan dan pajak negara. Pemasukan negara berupa pajak yang dikelola lembaga keuangan dikontrol sedemikian ketat dengan model pembukuan yang detail diikuti pemeriksaan secara berkala. Dengan demikian, korupsi pajak para pejabat di lembaga birokrasi negara dapat direduksi dan dicegah. Inilah warisan Daendels yang patut dicatat dalam panggung sejarah Indonesia. \*\*\*

**Heri Priyatmoko, Dosen Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta**